

**MODEL PELAYANAN PERIZINAN USAHA  
DALAM PENINGKATAN INVESTASI  
DI KABUPATEN BOYOLALI**

**TESIS**

**Diajukan Kepada  
Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelara Magister dalam Ilmu Hukum**



**Oleh**

**THERESIA DWIJAYANTI DHARMESTI UTAMI  
NIM. R 100 080 070**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
SEKOLAH PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2017**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TESIS**

**MODEL PELAYANAN PERIZINAN USAHA  
DALAM PENINGKATAN INVESTASI  
DI KABUPATEN BOYOLALI**

**Oleh**

**THERESIA DWIJAYANTI DHARMESTI UTAMI  
NIM. R 100 080 070**

Telah disetujui:

Pembimbing I



Prof. Dr. Harun SH., MHum.

Pembimbing II



Wardah Yuspin Ph.D

Tanggal 8 Juli 2017

## NOTA PEMBIMBING

**Prof. Dr. Harun SH., M.Hum**

Program Studi Ilmu Hukum

Sekolah Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Nota Dinas

Hal: Tesis Saudara Theresia Dwijayanti Dharmesti Utami

Kepada Yth.

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Sekolah Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Surakarta

*Assalamu `alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap tesis saudara:

Nama : Theresia Dwijayanti Dharmesti Utami  
NIM : R 100080070  
Konsentrasi : Hukum Administrasi Publik  
Judul : MODEL PELAYANAN PERIZINAN USAHA  
DALAM PENINGKATAN INVESTASI DI  
KABUPATEN BOYOLALI

Dengan ini kami menilai tesis tersebut dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang ujian tesis pada Program Studi Ilmu Hukum, Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.

*Wassalamu `alaikum wr. wb.*

Surakarta, 8 Juli 2017

Pembimbing,



Prof. Dr. Harun SH., M.Hum

## NOTA PEMBIMBING

**Wardah Yuspin Ph.D**

Program Studi Ilmu Hukum

Sekolah Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Nota Dinas

Hal: Tesis Saudara Theresia Dwijayanti Dharmesti Utami

Kepada Yth.

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Sekolah Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Surakarta

*Assalamu `alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap tesis saudara:

Nama : Theresia Dwijayanti Dharmesti Utami  
NIM : R 100080070  
Konsentrasi : Hukum Administrasi Publik  
Judul : MODEL PELAYANAN PERIZINAN USAHA  
DALAM PENINGKATAN INVESTASI DI  
KABUPATEN BOYOLALI

Dengan ini kami menilai tesis tersebut dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang ujian tesis pada Program Studi Ilmu Hukum, Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.

*Wassalamu `alaikum wr. wb.*

Surakarta, 8 Juli 2017  
Pembimbing,



Wardah Yuspin Ph.D



**TESIS BERJUDUL**  
**MODEL PELAYANAN PERIZINAN USAHA DALAM**  
**PENINGKATAN INVESTASI DI KABUPATEN BOYOLALI**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh  
**THERESIA DWIJAYANTI DHARMESTI UTAMI**  
telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
pada tanggal 14 Juli 2017  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

**SUSUNAN DEWAN PENGUJI**

Pembimbing I



**Prof. Dr. Harun, S.H., M.Hum.**

Pembimbing II



**Wardah Yuspin, Ph.D.**

Penguji



**Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.**

Surakarta, 14 Agustus 2017  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Sekolah Pascasarjana  
Direktur,



**Prof. Dr. Bambang Sumardjoko**

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Theresia Dwijayanti Dharmesti Utami  
NIM : R 100 080 070  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara  
Judul : Model Pelayanan Perizinan Usaha Dalam  
Peningkatan Investasi Di Kabupaten Boyolali

menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya serahkan benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan-ringkasan yang telah saya jelaskan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti tesis ini jiplakan dan terdapat plagiasi, gelar yang diberikan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta batal saya terima.

Surakarta, 8 Juli 2017

Yang membuat pernyataan,



Theresia Dwijayanti Dharmesti Utami

## MOTTO

*“Satu-satunya hal yang harus kau takuti adalah ketakutan itu sendiri”  
(Franklin D. Roosevelt)*

*“Jangan pernah menunggu. Waktunya tidak akan pernah tepat”  
(Napoleon Hill)*

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala kerendahan hati dan ketulusan jiwa, karya ini kupersembahkan untuk :

1. Suamiku dan anakku tercinta.
2. Almamater tercinta.



## **KATA PENGANTAR**

Ungkapan rasa syukur, penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, dengan rahmat dan hidayah-Nya, tesis ini dapat terselesaikan. Tesis ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam rangka penelitian dan penulisan tesis ini banyak bantuan dari berbagai pihak terhadap penulis. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih pada semua pihak yang telah memberikan bantuannya, baik moral, material dan fasilitas terhadap penulis pada:

1. Bapak Dr. Sofyan Anif, M.Si., rektor UMS Surakarta yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk mengikuti program Magister Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Bambang Sumardjoko M.Pd., Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan studi.
3. Ibu Wardah Yuspin Ph.D., selaku ketua program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
4. Bapak Prof. Dr. Harun, SH. M.Hum., selaku pembimbing utama yang telah memberi kesempatan untuk mengikuti program S2 dalam bidang Ilmu Hukum dan telah memberikan arahan serta koreksi dalam penulisan tesis.
5. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Boyolali yang telah mengijinkan melaksanakan penelitian di kantor (BPMP2T) Kabupaten Boyolali.
6. Pimpinan Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan fasilitas dalam penyelesaian studi kepustakaan.
7. Bapak Dr. Kelik Wardiono S.H.,M.H., selaku dosen penguji tesis yang telah memberikan arahan serta koreksi dalam penulisan tesis.

8. Papa, Mama, Ibu, Bapak, Kakak-kakakku tercinta yang selalu mendoakan dan mendorongku hingga selesainya tesis ini
9. Rekan-rekan pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas segala bantuan dan partisipasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

Dengan selesainya penulisan Tesis ini, penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan kesalahan yang tidak selayaknya ada dalam Tesis ini. Oleh karena itu segala saran dan kritik yang bersifat positif dan membangun sangat penulis harapkan.

Surakarta,

Juli 2017

Penulis,

## DAFTAR ISI

Judul .....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Nota Pembimbing .....	iii
Pengesahan .....	v
Pernyataan Keaslian Tesis.....	vi
Motto .....	vii
Persembahan .....	viii
Kata Pengantar .....	ix
Daftar Isi .....	xi
Abstrak .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian .....	9
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Kerangka Teori Dasar .....	14
1. Landasan Teori .....	14
2. Pengertian Izin .....	18
3. Urgensi Izin .....	26
4. Permasalahan Dalam Permohonan Dan Proses Penerbitan Izin .....	29
B. Perizinan Di Boyolali .....	33
1. Hukum Yang Mengatur Tentang Bagaimana Jalannya Perizinan Usaha Di Boyolali .....	34
2. Prosedur Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Di Kabupaten Boyolali .....	48
3. Persyaratan Perizinan Investasi Di Kabupaten Boyolali .....	56
4. Penyelesaian Sengketa Perizinan di Kabupaten Boyolali .....	72

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Mengenai Pelayanan Publik, Khususnya dalam Hal Tatacara Perolehan Izin .....	74
B. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Di Daerah Kabupaten Boyolali .....	91
C. Peranan Model Pelayanan Perizinan Usaha Yang Berlaku Saat Ini Dalam Menunjang Peningkatan Investasi .....	97
D. Model Pelayanan Perizinan Usaha Yang Dapat Digunakan Untuk Menunjang Peningkatan Investasi .....	100

### BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan .....	106
B. Rekomendasi.....	107
Daftar Pustaka .....	108

## **Abstrak**

Setiap daerah di seluruh wilayah Indonesia, setelah dikeluarkannya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan batasan-batasan tertentu. Hal ini menyebabkan, masing-masing pemerintah daerah dapat membuat kebijakan yang berbeda-beda dalam mengatur hal tertentu sesuai dengan kebutuhan masing masing daerah, termasuk kebijakan mengenai pelayanan perizinan. Pelayanan perizinan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Dengan pelaksanaan pelayanan perizinan yang efektif dan efisien akan dapat meningkatkan minat pelaku investasi untuk menanamkan modal usahanya pada suatu daerah. Pelaksanaan pelayanan perizinan yang efektif dan efisien di daerah Kabupaten Boyolali dilaksanakan dengan pola pelayanan perizinan terpadu satu atap dan pelaksanaannya di lakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Boyolali. Dengan pola pelayanan satu atap, diharapkan dapat mempersingkat waktu pemberian izin usaha dan dapat menekan biaya yang dikeluarkan oleh pemohon izin, sehingga akan mempermudah pemohon dalam mengajukan proses permohonan izin. BPMP2T telah mengembangkan pelayanan perizinan secara online, dengan tujuan agar pemohon izin juga dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pelayanan perizinan. Dengan adanya kemudahan yang telah diberikan, diharapkan dapat meningkatkan minat pelaku investasi untuk menanamkan modal di Kabupaten Boyolali dan dapat meningkatkan nilai Investasi di bidang usaha di daerah Kabupaten Boyolali untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Kata Kunci: Pelayanan perizinan, pelayanan satu atap, peningkatan investasi



### ***Abstract***

*Law Number 32 Year 2004 regarding Local Government provide an authority to the local government to organize and manage its own governmental affairs according to the principle of regional autonomy and functional assignment with certain restrictions. Therefore, each local government have authority to enact different policy in regulating a certain issue in accordance with the needs of each region, including the policies on licensing services. Licensing services is one of the most important aspect in increasing own-source revenue. The implementation of effective and efficient licensing services is expected to increase the interest of investor to invest their capital in the region. The implementation of the licensing services policy in Boyolali has been implemented by Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Boyolali. Boyolali implementing a one-stop service method as implementation of licensing service policy, it is expected to shorten the time of granting business license and can reduce the cost incurred by the applicant permit, so that will facilitate the applicant in filing the permit application process. BPMP2T has been developing online licensing services, with the aim that the applicants can also have an active role in the implementation of licensing services. The ease that has been given, is expected to increase the interest of investors to invest in Boyolali district, thus can increase the number and value of business investment in the district Boyolali to increase the own-source revenue.*

*Keywords: Licensing services, one stop service, increased investment*